

BAB IV

PENUTUPAN

KESIMPULAN

Pada hakikatnya, suatu negara bertanggung jawab untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam negerinya. Hal-hal yang tidak mampu untuk dipenuhi secara mandiri, maka negara akan membangun hubungan dengan negara lain, meningkatkan pergaulan di dunia internasional untuk mendapatkan kesempatan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan negaranya. Kondisi internal dan eksternal suatu negara biasanya memiliki keterkaitan yang erat. Setiap kebijakan luar negeri suatu negara didasarkan pada keadaan atau kondisi dalam negerinya. Kebijakan yang diambil tentunya diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi negara tersebut, hasilnya mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Para pengambil kebijakan menggunakan kepentingan nasional sebagai petunjuk arah dalam merumuskan kebijakan luar negeri, dengan kata lain arah politik luar negeri suatu negara ditentukan oleh kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional ini lah yang menjadi dasar bagi negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Dalam pergaulan dunia internasional dan interaksi dengan negara lain yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan luar negeri, suatu negara akan mengedepankan dan berusaha untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya agar tercapai.

Pada awal tahun 2018 dunia internasional dimeriahkan oleh gelaran ajang olimpiade olahraga musim dingin yang diselenggarakan di Pyeongchang, Korsel pada 19-25 Februari. Olimpiade ini adalah ajang perlombaan olahraga yang digelar secara rutin setiap sekali dalam empat tahun tepatnya ketika

musim dingin. Kemudian hal yang mengejutkan datang dari Korut, yang mana pemimpin tertinggi negara tersebut Kim Jong-Un, mengutarakan keinginan Korut untuk ikut berpartisipasi dalam gelaran Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 melalui pidato kepresidenan menyambut tahun baru 2018.

Dalam pidato tersebut Presiden Kim Jong-Un menyatakan bahwa Korut tidak hanya ikut berpartisipasi dalam perayaan olimpiade tersebut, namun juga bersedia untuk membantu Korsel menyukseskan penyelenggaraan olimpiade tersebut. Dalam poin tersebut Korut bersedia untuk mengirimkan delegasi dan menawarkan pertemuan dengan Korsel untuk membicarakan keikutsertaan Korut. Pihak Korsel melalui Presiden Moon Jae-In menyambut hal ini dengan tangan terbuka.

Pertemuan antara Korut dan Korsel terkait keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 akhirnya dilaksanakan pada 9 Januari 2018. Kemudian dalam pertemuan ini menghasilkan kesepakatan Korut ikut berpartisipasi dalam olimpiade tersebut, serta bersedia mengirimkan delegasi dengan jumlah, sekitar 22 pemain, 229 *cheerleaders*, dan 27 pejabat tinggi Korut¹. Dari 102 nomor pada 15 cabang olahraga dalam penyelenggaraan lomba olimpiade tersebut, atlet Korut ikut bertanding dalam tiga cabang olahraga dan lima disiplin. Kedua Korea juga sepakat untuk membuat tim gabungan untuk ikut bertanding dalam cabang olahraga Hoki Wanita. Dalam upacara pembukaan olimpiade, atlet Korut dan Korsel juga melakukan pawai bersama di bawah bendera reunifikasi Korea.

¹ *ibid.*

Sejak awal pernyataan dari Presiden Kim hingga terwujudnya keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018, Korut menjadi sorotan utama dunia internasional di awal tahun 2018 tersebut. Hal ini menjadi suatu hal yang sangat tidak terduga yang dilakukan oleh Korut. Dalam keikutsertaannya ini, sikap Korut terkesan melunak terhadap Korsel. Tidak seperti Korut yang biasanya cenderung agresif dan selalu terlihat menggunakan *hard power* sejak pecahnya perang saudara di Semenanjung Korea pada 1950.

Keikutsertaan Korut dalam olimpiade olahraga semacam ini memang bukanlah yang pertama kalinya. Dalam sejarahnya, Korut sendiri pertama kali mulai mengikuti ajang olimpiade olahraga pada tahun 1964, yaitu pada Olimpiade Musim Dingin ke-9 yang diselenggarakan di Innsbruck, Austria. Bahkan Korut tercatat telah beberapa kali mengikuti ajang olimpiade olahraga, baik musim dingin maupun musim panas meskipun tidak secara rutin. Bahkan beberapa ajang lomba olahraga lainnya seperti Piala Dunia dan Asian Games.

Namun keikutsertaan Korut pada Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 menjadi yang pertama kalinya untuk penyelenggaraan yang dilakukan di Korsel. Pasalnya, Korsel pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas Seoul 1988 akan tetapi Korut tidak ikut serta dalam ajang olimpiade tersebut. Korut bahkan melakukan pemboikotan terhadap penyelenggaraan olimpie tersebut bersama beberapa negara yang dekat dengannya seperti Kuba, Nikaragua, Madagaskar, Albania, Seychelles, dan Ethiopia.

Pemboikotan tersebut dilakukan oleh Korut untuk membalas hasil dari kesepakatan IOC yang memutuskan untuk tidak mengizinkan Korut sebagai *co-host* atau tuan rumah kedua dalam penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas Seoul 1988. Sehingga Korut merasa bahwa hasil kesepakatan

tersebut merupakan persekongkolan dari para komite penyelenggara.

Selain itu jika kita melihat dari kondisi yang sedang dialami oleh Korut saat ini, yang mana Korut sedang terikat sanksi dari DK PBB terkait kegiatan uji coba senjata nuklir miliknya yang pertama kali dilakukan pada 2006 dan terakhir kali tercatat Korut melakukan uji coba di tahun 2017. Sanksi terberat yang dijatuhkan kepada Korut adalah sanksi ekonomi yang tertuang dalam 10 resolusi untuk tahun 2006 hingga 2017. Sanksi ekonomi tersebut menargetkan berbagai sektor yang dapat menjadi sumber modal bagi Korut untuk melakukan kegiatan proliferasi senjata nuklir menjadi sasaran, diantaranya adalah penutupan badan-badan usaha asal Korut, pembatasan bahkan penghentian kegiatan ekspor-impor hasil produksi atau bahan mentah untuk produksi dengan Korut diberbagai sektor (tekstil, manufaktur, mineral, minyak, agrikultur, makanan).

Akibat sanksi ekonomi yang mengikat Korut, terjadi penurunan pada angka produksi industri Korut menjadi 8,5 persen, hasil produksi dari sektor pertanian dan industri konstruksi menyusut sebesar 1,3 persen dan 4,4 persen. Merosotnya sumber-sumber penghasilan ekonomi Korut mengakibatkan PDB Korut menurun sebesar 3,5 persen di tahun 2017. Bahkan angka tersebut adalah jumlah paling rendah sejak musibah kelaparan Korut pada tahun 1997.

Kemerosotan tersebut sudah pasti menunjukkan adanya ketidak stabilan dalam perekonomian Korut, dalam keadaan yang tidak stabil tersebut Korut memberanikan diri untuk ikut berpartisipasi pada Olimpiade Pyeongchang mengingat keikutsertaan tersebut negara juga harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit misalnya untuk membiayai dan memfasilitasi para atletnya.

Tentunya keikutsertaannya ini, dirasa sangat perlu oleh Korut. Bukan tanpa ada alasan dan tujuan dalam pengambilan keputusan tersebut. Ada hal-hal yang dicari dan pastinya ingin dicapai melalui keikutsertaannya dalam Olimpiade musim Dingin Pyeongchang 2018. Hal-hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi Korut untuk memutuskan keikutsertaannya.

Melalui kerangka berfikir yang digunakan dalam skripsi ini yaitu *konsep kepentingan nasional* dan *model pengambilan keputusan luar negeri William D. Coplin*, dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mendorong keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 yaitu: 1. Adanya dukungan langsung dari birokrasi dalam proses pengambilan keputusan; 2. Membentuk citra baik bagi Korut (*image building*); 3. Mendapatkan kembali peluang kerjasama dengan Korsel.

Faktor pertama dikarenakan adanya dukungan langsung dari dalam birokrasi Korut itu sendiri terkait kebijakan tersebut. Kim Jong Un selaku pemimpin tertinggi di Korut memiliki hak penuh untuk mengambil segala tindakan dan memutuskan berbagai kebijakan terkait negaranya melalui Partai Buruh Korea sebagai pendukung dari seluruh kebijakan yang diambil dan yang juga akan memberikan berbagai pengaruh serta masukan dalam proses pengambilan kebijakan. Sedangkan masyarakat Korut sendiri tidak pernah berkesempatan untuk terlibat dalam setiap urusan politik di negara tersebut, mereka hanya patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh rezim.

Terkait keputusan Kim Jong Un untuk ikut berpartisipasi dalam Olimpiade Pyeongchang 2018, tentunya tidak terlepas dari masukan dan pengaruh orang-orang terpercaya yang memegang posisi penting dalam pemerintahannya, diantaranya seperti Ri Son Gwon yang merupakan Ketua Komite Reunifikasi Damai Negara dan Choe Hwi yang merupakan Menteri Olahraga dan tokoh

kebudayaan Korut. Ri Son Gwon sendiri menyatakan secara langsung dukungannya terhadap keputusan tersebut pada pertemuan tingkat tinggi antara Korut dan Korsel pada 9 Januari 2018, yang mengharapkan agar keikutsertaan Korut tersebut dapat menjadi hadiah awal tahun terbaik di Semenanjung Korea. Serta Choe Hwi, sejalan dengan kedudukannya sebagai Menteri Olahraga dan tokoh kebudayaan Korut sehingga ia adalah salah satu tokoh yang memang selalu menjadi pelopor atas keikutsertaan Korut di setiap olimpiade olahraga, begitupun dengan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 adalah terobosan baru dari Choe mengenai hubungan Korut dengan Korsel.

Faktor kedua adalah adanya keinginan Korut untuk membentuk citra baik Korut di dunia internasional. Keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyongchang 2018 adalah sebagai momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan prestise negaranya di dunia internasional, yang mana melalui keikutsertaannya dalam olimpiade ini secara tidak langsung akan memberikan citra baik atau pandangan positif terhadap Korut yang selama ini selalu dianggap sangat agresif dan cenderung menggunakan *hard power* terkait kegiatan uji coba senjata yang selalu dilakukan oleh Korut sejak tahun 2006 hingga terakhir kali pada akhir 2017 lalu.

Menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian ada pada tujuan gerakan olimpiade yang dilakukan melalui kegiatan ajang lomba olahraga harus dianut dan disebarikan oleh para peserta. Dari hal tersebut secara tidak langsung Korut pun ikut mematuhi hal tersebut, dalam artian ini akan menggiring opini masyarakat internasional bahwa Korut kini mulai melunak bahkan ikut menyebarkan perdamaian di dunia internasional melalui olimpiade tersebut.

Faktor ketiga adalah mendapatkan kembali peluang kerjasama dengan Korsel. Keikutsertaannya dalam Olimpiade

Pyongyang 2018 ini memberikan awalan yang baik bagi Korut. Langkah yang diambil oleh Korut untuk ikutserta dalam olimpiade tersebut secara tidak langsung membuka kembali pintu kerjasama bagi Korut dengan Korsel, karena keikutsertaannya tersebut menghadirkan dan membentuk rasa percaya Korsel terhadap Korut meskipun masih banyak yang harus tetap dipertimbangkan oleh Korsel terkait pengembangan senjata nuklir yang dimiliki Korut serta sanksi-sanksi-sanksi internasional untuk Korut yang harus dipatuhi oleh Korsel sebagai negara anggota PBB.

Kedua Korea mulai mengarah pada kerjasama ekonomi, yang mana hal ini tentunya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak terutama bagi kondisi ekonomi Korut yang sedang mengalami ketidak stabilan akibat sanksi ekonomi yang kini menjerat. Akibat sanksi ekonomi yang dijatuhkan padanya, PDB Korut pada tahun 2017 menurun sebesar 3,5 persen dari 2016. Produksi industri Korut menurun 8,5 persen, hasil produksi dari sektor pertanian dan industri konstruksi juga ikut menyusut sebesar 1,3 persen dan 4,4 persen.

Seperti pada pertemuan tingkat tinggi pemimpin Kedua Korea pada 19 September 2018 yang menyepakati untuk segera menormalisasikan kompleks Industri Gaesong, adanya pembicaraan kembali mengenai normalisasi proyek pariwisata bersama Gunung Kumgang², juga kerjasama pembangunan di sektor kereta api yang bertujuan untuk menghubungkan dan menghidupkan kembali jalur distribusi untuk kegiatan perekonomian yang menghubungkan Dua Korea dengan negara-negara lain di Asia Timur dan Eropa.

² MAJW, "Hasil Pertemuan Korea Utara & Korea Selatan: Sepakati Era Tanpa Perang" Retrieved Oktober 2018, from IDN Times: <https://www.idntimes.com.html>

Keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 ini benar-benar menjadi momen yang sangat bersejarah bagi hubungan Korut dan Korsel. Dari keikutsertaan Korut ini, banyak harapan baik itu dari Korut sendiri, Korsel, dan dunia internasional secara luas adalah awal dari langkah perdamaian di Semenanjung Korea. Harapannya adalah ini bukan hanya sekedar angin lalu semata sebagaimana yang biasanya selalu terjadi antara Korut dan Korsel yang selama ini tidak pernah berhasil dan selalu mendapatkan tanggapan dingin dari Korut sendiri disetiap ajakan dialog perdamaian. Di setiap ajang olimpiade maupun ajang olimpiade lainnya biasanya hubungan Korut dan Korsel hanya sebatas untuk bergabung dalam pawai pembukaannya saja, tidak pernah ada kelanjutan antara hubungan Korut dan Korsel setelah itu. Perubahan Korut dan perdamaian di Semenanjung Korea tidak hanya penting bagi kedua negara tersebut, tetapi juga mempengaruhi keamanan dan perdamaian dunia internasional.